



LAPORAN HASIL PENELITIAN

AKSESIBILITAS PELAYANAN SOSIAL
MASYARAKAT PEDESAAN
DI KABUPATEN KENDAL

Oleh:
DRA. APRIATNI EP, MSi
DRS. AGUS HERMANI
DRS. NGATNO

Dibiayai Oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro
Nomor: 202/XXIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996
Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian
Nomor: 211A/PT09.OP/B/1996
Tanggal 2 September 1996

USULAN PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : Aksesibilitas Pelayanan Sosial Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kendal.
- b. Bidang Ilmu : Kebijakan Publik
- c. Kategori Penelitian : Pengembangan untuk Pembangunan
2. Pembimbing Penelitian:
 - a. Nama : Dra. Rodhiyah, SU
 - b. Pangkat/Gol : Lektor/IVA
 - c. NIP : 130810133
3. Ketua Penelitian:
 - a. Nama : Dra. Apriatni EP, MSi
 - b. Pangkat/Gol : Lektor Muda/IIIC
 - c. Fak/Jurusan/PS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - d. NIP : 131610345
 - e. Pusat Penelitian : FISIP UNDIP
4. Anggota Tim Penelitian: 2 orang
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kendal
6. Lama Penelitian : 6 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp 2.700.000,00
8. Dibiayai Melalui : Operasi dan Perawatan Fasilitas Undip tahun 96/97.



Semarang, Pebruari 1997
Ketua Penelitian,

Dra. Apriatni EP, MSi
NIP 131610345



RINGKASAN

Dengan adanya ketimpangan dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat, akan berpengaruh terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelayanan sosial. Dalam hal ini akan muncul berbagai variasi akses masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelayanan sosial, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan informasi

Penelitian dengan judul Aksesibilitas Pelayanan Sosial Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Kendal, dimaksudkan untuk mengidentifikasi akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan informasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 80 responden dari 4 desa, yaitu Kaliayu, Kalirandu, Gondang dan Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Akses masyarakat terhadap pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan informasi cukup baik. Namun demikian akses masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap pelayanan sosial tersebut masih sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial ekonomi.

Perhatian terhadap aspek sosial, hendaknya tidak hanya berorientasi pada kuantitas saja, melainkan juga memperhatikan kualitas dari pelayanan sosial yang ada. Sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dapat tercapai.

SUMMARY

The Gap of social and economy structur will depend variety of social service accesibility. The people will receipt many kinds of social service especialy on education, healt and informations.

The research take a title : **Social service accesibility on rural society in Kendal Regency**. The aim of the research are to identify many kinds of social service especialy on education, healt and information. Eighty persons are taken as samples by purposive random sampling. They are live in Kaliayu, Gondang, Kalirandu, and Karangayu.

The result of the research shows that society accesibility toward education, healt and information are good. In other side shows that peoples to choice social service are very restricted. Social and economy factor depend the social service.

The goverment not only increase the number of facility but also the quality of social service. The prosperity of peoples can be reached by them. Beside, the prosperity of people will be increased if the goverment able to up grade the social service quality.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya, sehingga penelitian yang berjudul: "Aksesibilitas Pelayanan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Kendal", telah berhasil diselesaikan hingga laporan penelitian ini telah tersusun. Penelitian ini merupakan penelitian yang dibiayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro.

Dalam penelitian ini digunakan data primer, yaitu pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Kendal, serta data sekunder untuk melengkapi laporan penelitian ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam pengumpulan data.

Dapat dikatakan, bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan kami. Namun demikian diharapkan, bahwa laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk melanjutkan penelitian ini, serta untuk melengkapi informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Semarang, Pebruari 1997

Tim peneliti.

DAFTAR ISI

Ringkasan.....	i
Summary.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	10
G. Metodologi Penelitian.....	11
BAB II KONDISI SOSIAL EKONOMI.....	14
BAB III AKSESIBILITAS PELAYANAN SOSIAL.....	32
1. Akses di Bidang Pendidikan.....	32
2. Akses di Bidang Kesehatan.....	47
3. Akses di Bidang Informasi.....	53
BAB IV PENUTUP.....	56
1. Kesimpulan.....	56
2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel: II.1.	Jenis Kelamin.....	14
II.2.	Umur Responden.....	15
II.3.	Status Marital.....	16
II.4.	Pendidikan Terakhir.....	16
II.5.	Tingkat Pendidikan Suami/Istri.....	18
II.6.	Ketrampilan Yang Dimiliki.....	19
II.7.	Sumber Ketrampilan.....	20
II.8.	Penghasilan Pokok.....	21
II.9.	Pekerjaan Sampingan.....	22
II.10.	Jumlah Penghasilan dari Pekerjaan Pokok.....	23
II.11.	Jumlah Penghasilan dari Pekerjaan Sampingan.....	24
II.12.	Kebutuhan Menabung.....	25
II.13.	Status Kepemilikan Rumah/Tempat Tinggal.....	26
II.14.	Kepemilikan Sawah.....	27
II.15.	Kepemilikan Tegalan.....	27
II.16.	Kepemilikan Ternak.....	28
II.17.	Kepemilikan TV.....	29
II.18.	Kepemilikan Mobil.....	29
II.19.	Kepemilikan Sepeda.....	30
II.20.	Kepemilikan Sepeda Motor.....	31
III.1.	Jumlah Anak.....	33
III.2.	Jumlah Anak Yang Masih Sekolah.....	34
III.3.	Pendidikan Anak.....	35
III.4.	Tempat Sekolah SD.....	36
III.5.	Pendidikan Anak dari Orang Tua Yang Tidak Tamat SD.....	37
III.6.	Alasan Memilih Sekolah SD Dalam Lingkungan Kec.....	38
III.7.	Tempat Sekolah SMP.....	38
III.8.	Alasan Memilih Sekolah.....	39
III.9.	Pengaruh Faktor Pendidikan OT Terhadap Pilihan Mutu Sekolah.....	40
III.10.	Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Pilihan Mutu Sekolah.....	41
III.11.	Tempat/Lokasi Sekolah SMA.....	42
III.12.	Alasan Memilih Sekolah.....	43

III.13. Alasan Memilih Tempat Kuliah.....	45
III.14. Tempat Berobat.....	48
III.15. Jenis Pelayanan Kesehatan.....	49
III.16. Alasan Menggunakan Jenis Pelayanan Kesehatan.....	50
III.17. Jenis Kontrasepsi.....	51
III.18. Tempat Pelayanan KB.....	52
III.19. Media Informasi Yang Dimiliki.....	53
III.20. Kegunaan Media Elektronik.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tidak dapat disangkal bahwa khususnya setelah memasuki Orde Baru, Pemerintah Indonesia telah mulai menampakkan keberhasilannya dalam melaksanakan Pembangunan, namun disisi lain juga kita lihat, bahwa masalah-masalah pembangunan juga terus berkesinambungan hingga saat ini. Misalnya masalah tentang pertambahan penduduk, pengangguran, kemiskinan dan ketidakadilan/ketidakmerataan sebagai akibat daya beli yang rendah dan hampir tidak adanya efisiensi dalam birokrasi, terjadinya korupsi dan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah serta tingkat inflasi yang tinggi. Masalah ketidak efisienan pihak birokrasi dan korupsi serta ketimpangan-ketimpangan baik antara satu daerah dengan daerah lain, maupun antara masyarakat kota dan masyarakat desa masih saja mendominasi hingga saat ini.

Tinjauan umum ekonomi memperlihatkan bahwa terjadi adanya ketidak seimbangan struktural dalam ekonomi dan kemiskinan. Walaupun telah terjadi banyak perubahan-perubahan yang mengarah pada pertumbuhan yang terus menerus, namun kemiskinan tetap saja masih ada. Hal ini bisa disebabkan karena memang tingkat pendapatan masyarakat Indonesia yang rendah, atau bisa juga disebabkan karena proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan, tidak melibatkan masyarakat, sehingga kebijaksanaan tersebut tidak mencapai sasaran. J.H. Boeke (1953) menyebutkan bahwa masalah ketidak seimbangan struktural

dan kemiskinan, pada kenyataannya merupakan warisan periode kolonial, yang kemudian disebut dengan adanya "Dualisme Ekonomi".

Ketidak seimbangan struktur, bisa terjadi diberbagai sektor, namun pada intinya menunjukkan ketidak seimbangan antara kota modern dengan desa tradisional/pertanian. Ketidak seimbangan antara kota dan desa yang paling menonjol adalah perbedaan tingkat produktivitas. Namun ketimpangan yang disebabkan oleh tingkat produktivitas justru akan menyebar ke berbagai sektor, misalnya sektor tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Sajogy (Kompas, Januari 1983) dalam perhitungannya dengan tolok ukur kemiskinan mengungkapkan bahwa perbaikan telah banyak terjadi didesa-desa. Tetapi sajogy juga meramalkan bahwa daerah yang paling sulit dipecahkan, khusus untuk masalah kemiskinan adalah Pulau Jawa, baik pedesaan maupun perkotaan.

Pada tahun 1987, jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan mencapai 30 juta penduduk, sedangkan pada tahun 1990 terjadi penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu menjadi 27,2 juta penduduk (BPS, 1990: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976 - 1990). Selanjutnya pada tahun 1994 tinggal 25,9 juta. Kenyataan ini merupakan bukti nyata keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penurunan jumlah penduduk di garis kemiskinan tersebut dirasakan masih kurang, atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin masih cukup besar, terutama jika dikaitkan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan pembangunan, yang tidak boleh ditinggalkan adalah aspirasi dan tujuan-tujuan sosial. Hal ini disebabkan karena setiap pembangunan pasti terimplikasi dalam aspek sosial.

Diana Conyers (1991), dalam bukunya *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, menyatakan:

Dengan memberi perhatian kepada aspek sosial, maka perlu adanya perencanaan pelayanan sosial yang matang, baik bagi kebutuhan masyarakat kota maupun bagi masyarakat desa. Selama ini perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat kota/modern terus meningkat, tetapi kenyataan ini akhirnya justru akan menciptakan ketimpangan-ketimpangan yang terus menerus semakin dalam, terutama jika tidak diimbangi dengan memberikan perhatian kebutuhan masyarakat desa terhadap pelayanan sosial.

Aspek sosial dalam pembangunan merupakan bentuk penekanan yang sangat dirasakan meningkat sejalan dengan pembangunan di berbagai aspek lainnya. Harus diakui oleh negara-negara Dunia Ketiga, bahwa aspirasi dan tujuan sosial perlu dipertimbangkan dalam proyek-proyek pembangunan, jika ingin menciptakan kesejahteraan rakyat.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana akses masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Kendal terhadap pelayanan sosial.

B. Perumusan Permasalahan.

Sampai saat ini isu tentang ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi isu menarik untuk dibahas. Kemiskinan yang dimaksud didalam pembahasan penelitiann ini bukanlah miskin yang disebabkan karena malas bekerja, atau kondisi individual sehingga tidak dapat bekerja, melainkan kemiskinan

struktural yang dapat menghambat penggunaan sumber-sumber pendapatan yang ada. Kelompok ini misalnya: para petani yang tidak memiliki tanah ataupun memiliki tanah tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Termasuk juga dalam kelompok ini adalah yang disebut kelompok miskin secara ekonomi, yaitu para buruh yang tidak mempunyai ketrampilan dan juga pengusaha/wiraswasta yang tidak mempunyai cukup modal.

Isu ini menjadi penting untuk dibahas karena pada kenyataannya lebih dari separo rumah tangga pedesaan tergolong dalam kelompok tersebut di atas.

Metode Sajoga, di Propinsi Jawa Tengah jumlah rumah tangga miskin sebesar 15,1%, disusul kemudian oleh Jawa Timur 9,2% dan Daerah Istimewa Yogyakarta 4,3%. Jika dilihat dari penggolongan rumah tangga, yaitu miskin, hampir cukup dan tidak miskin/cukup, untuk propinsi Jawa Tengah dapat dilihat berikut ini:

		Miskin	Hampir Cukup	Cukup	Total
Jawa Tengah	N	715	1.647	2.373	4.735
	%	15,1	34,8	50,1	100

Terjadinya kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah/birokrat. Dengan demikian upaya-upaya menghapuskan kemiskinan tidak lepas dari usaha untuk meningkatkan pelayanan sosial yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan keseluruhan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemiskinan dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan sosial,

terutama jika kebijaksanaan pelayanan sosial tidak dirancang untuk dapat mengatasi permasalahan akses bagi orang miskin.

Dalam penelitian ini akan dibatasi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kebijaksanaan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan informasi.
2. Mengidentifikasi aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap pelayanan sosial.

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul: **Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Aksesibilitas Pelayanan Sosial Kendal**, bertujuan:

1. Mengidentifikasi kebijaksanaan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan informasi.
2. Mengidentifikasi aksesibilitas masyarakat pedesaan terhadap pelayanan sosial.

D. Kontribusi Penelitian.

1. Memberikan informasi kepada pemerintah/instansi terkait berkaitan dengan akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan sosial.

Memberikan informasi kepada pemerintah/birokrat yang berkompeten didalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, agar perencanaan pelayanan sosial di waktu yang akan datang, akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.